

**KEBIJAKAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP EKSISTENSI
KOMUNITAS KOREA UTARA “CHONGRYON” DI JEPANG**

*Japanese Government’s Policy Towards the Existence of North Korean
Community of “Chongryon” in Japan*

Preti Epira

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Preti.epira.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

In international relations there are diaspora phenomenon. One of the diaspora groups that exists today is the north korean community in japan (Chongryon). As a minority group of North Korean Communities often gets discriminatory treatment from the government as well as the Japanese public. there are four forms of discrimination experienced by Chongryon, including the exclusion of pension funds, the loss of subsidies to school fees, obtaining hate speech and citizenship discrimination. the policy of discourse conducted by japan can be analyzed through rational choice theory

Keyword : diaspora, discrimination, North Korea Community, Japanese’s Policy.

Dalam hubungan internasional terdapat fenomena diaspora. salah satu kelompok diaspora yang eksis hingga saat ini adalah komunitas korea utara di jepang (Chongryon). Sebagai kelompok minoritas Komunitas Korea Utara sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun masyarakat Jepang. ada empat bentuk diskriminasi yang dialami oleh Chongryon, diantaranya pengecualian dari dana pensiun, hilangnya subsidi biaya sekolah, mendapatkan ujaran kebencian dan diskriminasi kewarganegaraan. kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh jepang dapat di analisa melalui teori pilihan rasional.

Kata kunci : diaspora, diskirimnasi, Komunitas Korea Utara, Kebijakan Jepang.

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional terdapat fenomena yang disebut diaspora yang berarti adanya sekelompok manusia yang menempati wilayah yang bukan merupakan wilayah asli mereka (*homeland*). Suatu kelompok merasa dirinya sebagai diaspora karena “...membangun ikatan antar kelompok (lain) yang ingin bersama dan menjaga, dari jauh, hubungan dengan kelompok lain yang tersebut, meskipun berada di tempat lain, memiliki identitas yang sama” (Bruneau, 2010, hal. 35).

Komunitas Korea di Jepang merupakan salah satu kelompok diaspora yang terbentuk relatif kontemporer dan masih bertahan hingga abad ke-21. Komunitas ini muncul pasca Perang Dunia II akibat terjebaknya masyarakat semenanjung Korea di Jepang. Jepang memobilisasi sekitar 2 juta warga Korea ke Jepang dengan berbagai sebab seperti dijadikan tentara, tenaga kerja industri, maupun sebagai pekerja seks bagi tentara Jepang (Blomquist & Wertz, An Overview of North Korea – Japan Relations, 2015)

Masyarakat dalam komunitas ini berasal dari semenanjung Korea secara keseluruhan, baik yang sekarang menjadi Korea Utara maupun Selatan. Pasca Perang Dunia II, kekuasaan politik di semenanjung Korea terpolarisasi bersamaan dengan mulai munculnya persaingan ideologi Sosialisme dan Liberalisme yang masing-masing dipelopori oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet mendukung rezim Korea Utara (Democratic People’s Republic of Korea/DPRK), sementara AS mendukung rezim Korea Selatan (Republic of Korea/ROK), yang kemudian menjurus kepada Perang Korea pada tahun 1950. Oleh karena itu, komunitas Korea di Jepang kemudian juga harus memutuskan apakah berafiliasi dengan Korea Utara atau Korea Selatan.

Rupanya, rezim Korea Utara Kim Il Sung menaruh perhatian lebih terhadap komunitas ini dengan mengirimkan bantuan dana dan dukungan infrastruktur dan fasilitas sehingga komunitas ini kemudian mayoritas memilih

untuk berafiliasi dengan Korea Utara dan kemudian menyebut diri mereka “Chongryon” (Harris, 2017). Sementara itu, sebagian masyarakat yang pro dengan Korea Selatan memutuskan untuk membuat komunitas tersendiri yang bernama “Mindan” (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018)

Sebagai timbal baliknya, Chongryon menjadi salah satu sumber dana luar negeri bagi rezim Korea Utara. Dengan modal yang didapat dari dana Korea Utara, Chongryon berhasil menjadi jaringan institusi sosial dan ekonomi, mampu menghidupi diri sendiri dengan mendirikan rumah sakit, sekolah, bank, maupun menjadi donatur bagi Korea Utara dengan pendapatan yang diperoleh dari institusi-institusi tersebut (Harris, 2017)

Keberadaan Komunitas Korea Utara ini kerap kali mendapatkan perlakuan dari pemerintah Jepang maupun masyarakat Jepang. Penetapan kebijakan yang tergolong diskriminatif terhadap komunitas Korea Utara di Jepang juga dapat di analisis melalui teori pilihan rasional. Chongryon merupakan kelompok diaspora Korea Utara yang menetap di Jepang. Sebagai kelompok diaspora Chongryon membangun kehadiran identitas etnis Korea di masyarakat Jepang dan menciptakan komunitas non politik. Komunitas ini semakin berkembang di Jepang sebagai institusi social dan ekonomi.

Namun sayangnya, Chongryon juga mendirikan jaringan pachinko yang disinyalir sebagai markas untuk perjudian dan aktivitas terlarang. Selain itu, sindikat Chonryon yang melakukan tindak kejahatan lainnya di Jepang bernama *Chogins* yang di laporkan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan pengiriman uang ke Korea Utara dengan cara membuat pinjaman palsu atau penipuan lainnya agar terkesan tidak mengirimkan uang secara illegal dan sempat membuat otoritas keuangan Jepang menjadi retak dibawah lembaga keuangan tersebut. Permasalahan-permasalahan mengenai komunitas Korea Utara di Jepang didefenisikan sebagai sebuah ancaman bagi Jepang karena sudah mengganggu keamanan ke stabilan negara Jepang. Terlebih Korea Utara merupakan negara tertutup yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan Nuklir. Bahkan beberapa pada tahun 2017 Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal yang melewati Jepang.

Kehadiran Komunitas Korea Utara (Chongryon) Di Jepang

Masyarakat Korea yang berada di Jepang terbangun menjadi sebuah komunitas (zainichi). Komunitas tersebut pada awalnya adalah organisasi yang netral secara politik yang bekerja untuk membantu lebih dari 2 juta warga Korea yang tinggal di Jepang kembali pulang ke kampung halaman mereka, atau membantu mencari mata pencaharian bagi mereka yang memutuskan untuk menetap di Jepang. Berdirinya Komunitas Korea di Jepang dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat Jepang terhadap orang-orang Korea seperti sebuah ruang asing di tengah-tengah Jepang. Zainichi generasi pertama pada waktu itu menanggung kesengsaraan khusus mereka masing-masing, kondisi tersebut menumbuhkan semangat untuk bertahan hidup bersama (Sangjung, 2007).

Pecahnya Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950 juga berpengaruh terhadap masyarakat Korea yang tinggal di Jepang. Mereka juga harus memilih apakah akan berafiliasi dengan Korea Utara atau dengan Korea Selatan. Orang-orang Korea yang setuju dengan visi komunis Kim Il-sung, mengambil kendali penuh atas masyarakat dengan membentuk Komunitas Chongryon. Sebaliknya, warga Korea yang tidak setuju dengan visi komunis malah membentuk komunitas diaspora Korea Selatan yang terpisah dan disebut Mindan, yang berarti komunitas Korea Jepang terpisah sepanjang garis yang sama dan sekitar waktu yang sama dengan semenanjung Korea.

Chongryon didirikan pada bulan Mei tahun 1955 setelah sebelumnya sempat dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena terlibat dalam demonstrasi ilegal yang dipimpin oleh Partai Komunis Jepang, tetapi berhasil mengatur kembali sebagai Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang. Tujuan didirikan kembali komunitas ini adalah untuk memberikan dukungan kepada Korea Utara, bekerja untuk penyatuan damai dari dua Korea dan melindungi hak-hak orang Korea Utara di Jepang. Chongryon adalah kelompok masyarakat Korea terbesar di Jepang, dengan lebih dari 500.000 anggota (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Imigran Korea di Jepang mendirikan banyak organisasi gotong royong, lembaga keagamaan, dan badan-badan yang mengatur diri sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Korea, dan dengan demikian sekaligus berfungsi untuk membangun identitas Korea di Jepang.

Hingga abad 21 Komunitas masyarakat Korea Utara di Jepang masih eksis keberadaannya. Organisasi ini tidak hanya komunitas budaya, ideologi tetapi juga komunitas ekonomi, yang memberikan pengaruhnya pada pekerjaan, pendidikan, dan bahkan cara hidup bagi anggota komunitas tersebut. Namun aktivitas Chongryon secara konsisten dari masa ke masa selalu mengundang kontroversi di Jepang. Tercatat bahwa agen Korea Utara melakukan serentetan penculikan warga Jepang namun tidak diakui oleh Chongryon maupun pemerintah Korea Utara. Chongryon juga mendirikan sekolah sekolah Korea di Jepang, para Siswa yang telah berjanji setia kepada Korea Utara diajarkan kursus lanjutan dalam fisika nuklir dan teknik kontrol di Jepang (Fitsanakis, 2016). Chongryon juga sering digunakan sebagai media bagi spionase dan propaganda oleh pemerintah Korea Utara, yang berfungsi sebagai media aksi dalam persaingan Korea Selatan dengan Korea Utara. Karena kelompok diaspora pro-Korea Selatan Mindan jauh lebih kecil daripada Chongryon, pengaruh yang lebih tinggi di negara tersebut menjadi kebutuhan strategis bagi setiap pemerintah yang ingin mempertahankan pengaruh pada diaspora Korea di Jepang.

Disamping fokus pada tujuan diaspora di Jepang, selang waktu tahun 1959 hingga 1984, Chongryon yang disokong oleh pemerintah Korea Kim Il Sung memfasilitasi "repatriasi" lebih dari 93.000 penduduk Korea di Jepang untuk kembali ke Korea Utara (Makinen, 2016) Dampaknya orang-orang Korea Utara yang dikembalikan ke Korea Utara, sering menghadapi kesulitan ekonomi, kecurigaan dari badan-badan keamanan, dan kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga di Jepang. Lebih dari seribu migran adalah warga yang sudah dinaturalisasi kewarganegaraannya menjadi warga Jepang. Termasuk pasangan Jepang dari etnis Korea, anak-anak dari serikat campuran etnis, dan etnis Korea yang telah melalui proses panjang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Migrasi saat itu juga mengalami perlambatan karena kondisi

ekonomi yang memburuk di Korea Utara, dan karena berita tentang realitas di lapangan disaring kembali ke komunitas Korea di Jepang.

Sementara anggota Chongryon yang masih menetap di Jepang terus genjar memasivkan pergerakannya. Salah satunya dengan mengaktifkan Homepage situs web resmi Chongryon yang penuh dengan slogan propaganda Korea Utara dan berbagai tautan ke media yang dioperasikan oleh rezim Korea Utara. Hal yang menarik adalah adanya campuran karakter Jepang dan slogan propaganda yang ditulis dalam bahasa Korea mewakili identitas komunitas ini di tengah tengah masyarakat Jepang. Sikap politik dalam pengenalan identitas diri Chongryon juga sejalan dengan Korea Utara, menggunakan frase anti Amerika seperti "Amerika Serikat imperialis, Amerika telah secara ilegal menduduki Korea Selatan"

Selain melakukan propaganda di media, Chongryon juga mendirikan Sekitar 130 lembaga pendidikan berafiliasi dengan Korea Utara, bahkan termasuk Universitas Korea (meskipun situs resmi hanya mendaftar 66 lembaga pendidikan, jumlah sebenarnya diyakini dua kali lipat lebih banyak). Lembaga-lembaga tersebut didanai oleh perusahaan "Chongryongye", sebuah istilah yang mewakili perusahaan-perusahaan yang berada dibawah pengawasan di Chongryon (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Pada saat yang sama, Chongryon secara finansial membantu rezim Korea Utara sebagai hubungan timbal balik yang dilakukan oleh Kim Il sung saat proses polarisasi komunitas Korea Utara dan Korea Selatan. Chongryon juga mendirikan *the Korean Science and Technology Association in Japan* (KSTA) yang menyediakan dukungan materi dan teknis untuk program senjata Korea Utara (Durand J. F., 2017)

Kebijakan Diskriminatif Yang Di Terapkan Oleh Jepang Terhadap Chongryon

Kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah Jepang sangat bertolak belakang dengan kondisi sosial maupun politik bagi Komunitas Chongryon Korea Utara yang ada di Jepang. Menurut pandangan penulis,

Perubahan-perubahan dinamika kebijakan pemerintah Jepang yang diskriminatif terhadap Komunitas Chongryon telah memicu konflik hubungan antara Jepang dan Korea Utara, dan begitupun sebaliknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara terhadap uji coba nuklir telah memberi *bad impact* terhadap masyarakat Korea Utara “Chongryon” .

Setidaknya ada empat bentuk diskriminasi kebijakan Jepang terhadap Chongryon di Jepang. *Pertama*, pengecualian warga Korea Zainichi ke dalam program pensiun pemerintah Jepang. UU baru mengenai pensiun di Jepang diterapkan pada 1981 menyatakan bahwa penduduk yang tinggal di Jepang—tak terkecuali—dapat memperoleh program pensiun jika selama bekerja mereka membayar asuransi pekerja dalam jangka waktu tertentu. UU ini awalnya dikeluarkan pada 1959 dan masih membatasi penerima pensiun hanya warga negara Jepang saja, yang kemudian diamandemen pada 1981 agar sesuai dengan UU imigran yang baru diratifikasi pemerintah Jepang waktu itu. Namun faktanya, warga Korea Zainichi—termasuk juga Chongryon—tidak mendapat pensiun seperti yang telah ditetapkan UU. Bahkan, pengadilan Jepang menyatakan bahwa pengecualian ini tidak melanggar hukum karena parlemen memiliki alasan tersendiri yang dapat membuat pengecualian bagi Zainichi. Pengecualian, pada 2002, berdampak pada sekitar 25 ribu lansia Zainichi tidak mendapat pensiun padahal telah bekerja sesuai regulasi pemerintah Jepang selama bertahun-tahun.

Kedua, pengecualian Zainichi dari lapangan pekerjaan publik/sipil di Jepang. Memang, secara legal hanya warga negara Jepang yang dapat menjadi pegawai negeri sipil dalam bidang pengambilan keputusan dan kekuasaan publik tapi UU Jepang tidak membatasi warga negara asing untuk menjadi pekerja di sektor publik. Namun, faktanya warga Korea Zainichi didiskriminasi untuk bekerja di sektor publik dan menempati posisi-posisi strategis seperti manajer; secara umum warga Zainichi dipersulit untuk dapat berkarir di ranah publik/sipil Jepang.

Ketiga, pemotongan subsidi pemerintah Jepang terhadap sekolah-sekolah Chongryon. Di Jepang, seluruh sekolah mendapat subsidi pemerintah begitu juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh komunitas Chongryon. Namun, sekolah-

sekolah ini mengalami diskriminasi dengan pemotongan subsidi dari prefektur masing-masing. Pada 2006, subsidi total ke sekolah-sekolah Chongryon bernilai sekitar 600 juta yen namun turun menjadi 100 juta yen pada 2016 (Shimpei Doi, Gen Okamoto, & Ryuichi Kitano, 2017).

Keempat, secara sosial warga Zainichi menjadi korban *bullying* dan *hate speech* dari masyarakat Jepang. Diskriminasi ini merupakan yang terparah karena pemerintah tidak dapat secara langsung mengontrol dan memberi sanksi terhadap pelaku *hate speech* (yang juga ini menunjukkan bahwa masalah *hate speech* ke warga Zainichi bukan menjadi prioritas masalah Jepang). *Bullying* juga mengarah ke tindakan-tindakan fisik seperti perobekan baju terhadap warga Zainichi yang mengenakan pakaian khas Korea di jalan-jalan di Tokyo (Mc Curry, 2017).

Konsideran-Konsideran Yang Mempengaruhi Jepang Mengambil Kebijakan Diskriminatif Terhadap Chongryon

A. Isu Penculikan

Penculikan warga negara tentu menjadi ancaman besar bagi suatu negara. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak warga Jepang menghilang dalam keadaan yang tidak biasa. Dalam penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak berwenang Jepang mendapatkan kesaksian dari agen Korea Utara yang telah membelot mengungkapkan bahwa ada kemungkinan kuat kasus hilangnya warga negara Jepang merupakan penculikan yang dilakukan oleh Utara Korea (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017). Oleh sebab itu pada tahun 1991 Pemerintah Jepang mengangkat isu penculikan di setiap pertemuan nasional maupun internasional yang tersedia. Namun disisi lain Korea Utara dengan keras terus menyangkal keterlibatan apa pun dalam kasus tersebut. Setidaknya terdapat 17 orang korban penculikan yang merupakan warga negara Jepang oleh Korea Utara.

Pada pertemuan puncak pertama Jepang-DPRK yang diselenggarakan pada 17 September 2002, Kim Jong-Il, Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, akhirnya mengakui telah melakukan penculikan terhadap warga Jepang

setelah bertahun-tahun menyangkal, dan meminta maaf. Dia juga menyatakan bahwa di antara 13 korban penculikan, empat orang masih hidup, delapan orang tewas dan satu orang hilang di perbatasan saat masuk ke Korea Utara tidak dapat dikonfirmasi. Selain itu, ia mengakui penculikan Hitomi Soga, yang tidak ada dalam daftar untuk penyelidikan yang diminta oleh Pemerintah Jepang dan menegaskan bahwa ia masih hidup (Di sisi lain, ia mengklaim bahwa Miyoshi Soga dan Hitomi Soga yang telah menghilang pada saat yang sama, belum memasuki Korea Utara.) Selain itu, sementara berjanji untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab dan mencegah terulang kembali kasus penculikan tersebut. Kim meyakinkan Jepang bahwa ia akan memfasilitasi pertemuan antara korban dan keluarga mereka juga. sebagai kembalinya korban ke Jepang.

Pada 15 Oktober 2002, lima korban (Yasushi dan Fukie Chimura, Kaoru dan Yukiko Hasuike, dan Hitomi Soga) kembali ke Jepang dan akhirnya bersatu kembali dengan keluarga mereka. Dengan pertimbangan bahwa lima korban kembali ke Jepang harus diberi lingkungan di mana mereka bebas untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan masa depan keluarga mereka yang masih di Korea Utara, pada 24 Oktober 2002, Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa lima korban akan tetap di Jepang. Pemerintah juga sangat mendesak Korea Utara untuk memastikan keselamatan anggota keluarga mereka masih di Korea Utara dan segera menetapkan tanggal untuk kepulangan mereka ke Jepang.

B. Ancaman Nuklir

Hubungan bilateral Jepang dan Korea Utara semakin memburuk setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal, beberapa di antaranya melintasi wilayah Jepang, persepsi Jepang terhadap Korea Utara di Jepang semakin sangat menurun. Terungkap bahwa Korea Utara telah melakukan agenda nuklir Pyongyang dimulai pada 1990-an, Korea Utara telah dianggap sebagai musuh potensial yang dapat mengganggu keamanan negara oleh masyarakat Jepang. Namun, peningkatan ketegangan dan uji coba rudal yang agresif baru-baru ini meningkatkan kesadaran akan ancaman publik ke tingkat lain. Di bawah tekanan sosial seperti itu, tujuan

dan alasan keberadaan Chongryon terus-menerus dipertanyakan (Lee, Japan's North Korean Diaspora, 2018).

Pada tahun 2009, hubungan Korea Utara dengan Jepang memburuk secara signifikan dengan keluarnya Korea Utara dari perjanjian *the six party* dan melanjutkan beberapa kali uji coba rudal balistik pada tahun 2012 diikuti oleh uji coba nuklir tahun 2013 hingga saat ini. Pemerintah Jepang menanggapi dengan memperpanjang sanksi yang ada dan mengadopsi langkah-langkah baru, melembagakan larangan menyeluruh atas semua ekspor ke DPRK.

Ancaman nuklir menjadi salah satu konsideran yang mempengaruhi kebijakan diskriminatif Jepang yang harus diterima oleh Chongryon. Chongryon memfasilitasi ekspor ilegal komputer, bahan kimia, peralatan, dan mesin penting untuk Program senjata Pyongyang. Komunitas ini juga mengirimkan uang untuk mendukung rezim Korea Utara.

Diperkirakan, dana Chongryon antara \$ 600 juta dan \$ 1 miliar menjadi milik Korea Utara setiap tahun (Surya Rama Narasimha & Kotecha, 2018). Dana ini merupakan sumber mata uang asing terbesar Korea Utara dan telah diduga bahwa Chongryon secara terselubung terlibat dalam memperoleh mesin berteknologi tinggi seperti pabrik jet yang digunakan dalam pembuatan bom nuklir dan rudal untuk Korea Utara.

Terdapat 18 bank di Jepang yang berwenang untuk berurusan dengan Korea Utara. Pada 1993, Jepang mencatat perdagangan senilai setengah miliar dolar dengan Korea Utara. Di antara barang-barang yang diimpor oleh Jepang adalah kepiting salju yang dibawa oleh kapal Korea Utara.

Uang sering diperas dari warga Korea Utara Jepang oleh Pyongyang dengan mengancam akan mencelakai atau mempersulit hidup bagi keluarga mereka di Korea Utara. Ada laporan para eksekutif di serikat kredit yang digunakan oleh warga Korea Utara Jepang untuk mengambil uang dari rekening pelanggan mereka dan mengirimnya ke Pyongyang.

Menurut Washington Post, "Mantan pejabat Chongryon mengatakan Korea Utara menegaskan bahwa kesejahteraan orang-orang yang dicintai di rumah bergantung pada seberapa sering dan berapa banyak sanak keluarga mereka di

Jepang bersedia berkontribusi pada rezim Kim. Pemerasan uang dilakukan melewati Chongryon ke pemerintah” (Fisher, 2013).

Seorang pembelot Korea Utara yang bersaksi di hadapan Senat AS pada Mei 2003, mengatakan bahwa 90 persen dari komponen kunci dalam rudal Korea Utara dibuat di Jepang dan diselundupkan ke Korea Utara dengan bantuan Chongroyon.

Serikat kredit yang terkait dengan Chongryon, yang dikenal sebagai chogins, dilaporkan memainkan peran utama dalam mengumpulkan dan mengirim uang ke Korea Utara, membuat pinjaman palsu atau terlibat dalam praktik penipuan lain untuk secara ilegal mengirimkan dana. Pada akhir 1990-an, beberapa dari chogins yang diatur longgar mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan konsolidasi dan bailout multi-miliar dolar dari deposan mereka oleh pemerintah Jepang. Pihak berwenang Jepang kemudian menindak lembaga-lembaga keuangan ini, menempatkan kegiatan mereka di bawah pengawasan yang lebih besar dan menangkap mantan eksekutif karena penggelapan.

Kesimpulan

Sebagai kelompok minoritas tidak jarang Komunitas Korea Utara mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun masyarakat Jepang. ada empat bentuk diskriminasi yang dialami oleh Chongryon, diantaranya pengecualian dari dana pensiun, hilangnya subsidi biaya sekolah, mendapatkan ujaran kebencian dan diskriminasi kewarganegaraan.

Kehadiran Komunitas Korea Utara di Jepang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Jepang karena beberapa tindak kriminalitas yang melibatkan anggota Chongryon mengenai peculikan warga Jepang yang sangat mengancam keamanan negara Jepang yang memancing kemarahan besar bagi warga Jepang.

Hubungan antara Korea Utara dan Jepang semakin memburuk setelah Uji Coba Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. mendiskriminasi chongryon diharapkan dapat menghambat aliran dana Chongryon kepada Korea Utara.

Jepang memang bukan negara yang ramah terhadap masyarakat asing, namun diskriminasi terhadap kelompok diaspora Korea Utara adalah yang paling parah dari semua negara.

Adanya alasan mengenai pengambilan kebijakan diskriminatif terhadap Komunitas Korea Utara di Jepang kemudian menjadi poin penting dalam penelitian ini. Melalui teori pilihan rasional sebagai tolak ukur dalam mencari tahu alasan Jepang melakukan tindakan diskriminatif. Hal ini dikorelasikan sebagai pertimbangan untung rugi.

Daftar Pustaka

Buku

walter calnsaer, t. r. (2013). *handbook of International Relations* (Vol. 2). (N.

Aguilera, Ed.) London: SAGE Publications.

winarno, B. (2002). *teori dan Proses kebijakan publik*. yogyakarta: med press.

Charles William Kegley, S. L. (2013-2014). *world politics Trend and Transformation*. USA: suzanneJeans.

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Fatharini, A. T. (2015). *Hilangnya Akses Subsidi Pendidikan Bagi Sekolah Asing*. Yogyakarta: Departement Of International Relations.

Jurnal

Surya Rama Narasimha, Y. V., & Kotecha, R. (2018). Chongryon's Scenario in Japan. *International Journal of Advance Research and Development*, 250.

Overview: the Korean War and its Legacy. (2010). Retrieved maret 18, 2018, from stanford spice:

https://spice.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Korean_War1.pdf

Ben-Rafael, E. (2010). *Diaspora*. ISA.

Blomquist , R., & Wertz, D. (2015). An Overview of North Korea – Japan Relations. *NCNK- The National committee on North Korea*, 1.

Bruneau, M. (2010). Diasporas, transnational spaces and communities. In R. Bauböck, *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods* (pp. 35-50). Amsterdam: Asmterdam University Press.

Cho Ki-Weon. (2017, September 14). *Tokyo court rules against pro-North Korean High School*. Retrieved from The Hankoryeh:
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/811021.html

Drs. Toto Pribadi, A. M. (n.d.). Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik.

Durand, J. F. (2017). Japan, Chongryon, and Sanctions. *International Council on Korean Studies*, XXI(1), 94-118.

Durand, J. F. (2017). Japan, Chongryon, and Sanctions. *International Journal of Korean Studies*, XXI, 107.

Fisher, M. (2013). *North Korea is losing a crucial source of income: Koreans in Japan*. The Wasington Post.

Fitsanakis, J. (2016). *North Koreans are studying nuclear physics in Japan, say human rights activists*. intelnews.org.

Harris, J. (Director). (2017). *Inside North Korea's bubble in Japan* [Motion Picture].

Julio, E. (2017). *Pahit Manis Komunitas Chongryon, Setia Pada Korut Meski Seumur Hidup Tinggal di Jepang*. okezone.

- Kyodo. (2017, Desember 29). *Major Korean junior high school, cut off from Japan's tuition aid, to close in March*. Retrieved from The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/29/national/major-korean-junior-high-school-cut-off-japans-tuition-aid-close-march/#.W17Qx6iWbIV>
- Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK). (2014). *Discrimination Against Koreans in Japan: Japan's Violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Geneva: 85th Session of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.
- Lee, Y. (2018, Januari 5). *Japan's North Korean Diaspora*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/01/japans-north-korean-diaspora/>
- Lee, Y. (2018). *Japan's North Korean Diaspora*. Tokyo: the diplomat.
- Makinen, J. (2016). *93,000 people voluntarily left Japan for North Korea after World War II. Or did they?* Tokyo: Los Angeles Time.
- Mc Curry, J. (2017, September 2). *'Cockroaches' and 'old hags': hounding of the North Korean diaspora in Japan*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/cockroaches-and-old-hags-hounding-of-the-north-korean-diaspora-in-japan>
- Ploetzing, A. (2015). Strategic Points of Japan–North Korea. In D. Mierzejewski (Ed.), *On Their Own Paths. Japan and China Responses to the Global and Regional Challenges* (pp. 29-41). Łódź University Press: Łódź.
- Sangjung, K. (2007, february 2). Memories of a Zainichi Korean Childhood. *The Asia-Pacific Journal*, 5(2), 5.

website

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017, mei). *Abductions of Japanese Citizens*. Retrieved from <http://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf>:
<http://www.mofa.go.jp/files/000305207.pdf>

Shimpei Doi, Gen Okamoto, & Ryuichi Kitano. (2017, Agustus 30). *16 prefectures cut subsidies to Korean schools due to concerns*. Retrieved from The Asahi Shimbun:
<http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201708300003.html>

United Nations General Assembly. (2001). *Resolution No. A/56/673*. United Nations.

